

PEMAKNAAN MITIGASI KUTURAL DAN STRUKTURAL MASYARAKAT LERENG SELATAN GUNUNGAPI MERAPI

Nugroho Hari Purnomo¹⁾, Widodo Hariyono²⁾

¹⁾Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya
Kampus UNESA Ketintang Surabaya, Telp. (031) 8280009 Pes.402 / Faks. (031) 8281466

Email : nugrix@gmail.com

²⁾Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., Janturan Kota Yogyakarta, DIY, 0818268945
Email : widodohariyono@yahoo.com

ABSTRAK

Kurun waktu tahun 60-an sampai sebelum erupsi Merapi 2010, pemerintah sangat intensif membangun infrastruktur mitigasi struktural di lereng Merapi. Sementara di masyarakat sendiri telah mengenal mitigasi kultural secara turun menurun dari leluhur mereka. Permasalahannya adalah bagaimana pemaknaan masyarakat terhadap kedua model mitigasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan masyarakat terhadap mitigasi kultural dan struktural menjelang dan sesudah erupsi Merapi 2010. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam kepada penduduk korban erupsi Gunungapi Merapi 2010 yang tinggal pada kawasan rawan bencana II atau III di lereng selatan Desa Umbulharjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Analisis yang digunakan adalah penafsiran yang terkait dengan pemaknaan suatu analog yang dipahami dari lisan dan data tekstual. Pemaknaan menggunakan pendekatan hermeneutika dengan didasari konsep penghidupan berkelanjutan. Analisis didukung dengan literatur yang bersifat historis yang memberikan gambaran pemaknaan masyarakat terhadap merapi di masa lampau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan mitigasi kultural dan struktural oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan waktu sebelum dan sesudah erupsi 2010. Kelompok masyarakat pertama, sebelum erupsi mitigasi kultural lebih bermakna bagi masyarakat sementara pasca erupsi masyarakat memaknai secara terpadu mitigasi kultural dan struktural. Kelompok masyarakat kedua, sebelum erupsi dan pasca erupsi masyarakat telah memaknai secara terpadu mitigasi kultural dan struktural. Pada mitigasi kultural, masyarakat dalam berinteraksi dengan alam memaknai kehidupannya tentang adanya takdir kehidupan yang bersumber dari pandangan hidup Jawa dan kepercayaan-kepercayaan terhadap Gunungapi Merapi. Pada mitigasi struktural, pemerintah mengkonstruksi masyarakat untuk memaknai bahwa kehidupannya dengan alam Gunungapi Merapi terdapat suatu risiko kebencanaan berdasarkan rasionalitas ilmiah.

Kata Kunci : Pemaknaan, mitigasi, kultural, struktural

ABSTRACT

Since 1960's the government of Indonesia has intensively built structural mitigation infrastructure on the slopes of Merapi before it erupted in 2010. In the other hand, the community has been introduced cultural mitigation inherited by their ancestors. The problem is the way how they understand both mitigation models. This study aims to determine people's interpretation towards cultural and structural mitigation before and after the eruption of Merapi volcano in 2010. The study used in-depth interviews method to victims of Merapi eruption in 2010, who live in disaster prone areas (KRB) II and III on the southern slope of Kepuharjo and Umbulharjo village, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. The hermeneutic analysis is applied to interpretative ideas associated with an analog understood from the oral and textual data. The analysis is supported by the historical literature, which gives an overview of Merapi for its community in the past. The study results that people's interpretation of cultural and structural mitigation in Merapi society can be divided into two based on time before and after its eruption in 2010. The first groups or ones with ideas before the eruption, cultural mitigation is more meaningful for them and after eruption they combine it as an integrated cultural and structural mitigation. While the second community, before and after eruption, they have already made sense of integrated cultural and structural mitigation. In cultural mitigation, in interacting with nature, they understand about the fate of life that comes from the Javanese philosophy and beliefs of the Merapi volcano. In structural mitigation, the government constructs people to make sense that based on scientific rationality their life with nature on the slopes of Merapi volcano can emerge a risk of disaster anytime.

Keywords: interpretation, mitigation, cultural, structural.

PENDAHULUAN

Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (UU No. 24/2007). Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Secara umum mitigasi dapat dibedakan menjadi mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural merupakan sisi eksternal masyarakat yang berkaitan dengan sistem kebijakan pemerintah untuk masyarakat dalam bentuk infrastruktur maupun non infrastruktur. Kurun waktu tahun 60-an sampai sebelum erupsi Merapi 2010, pemerintah sangat intensif membangun infrastruktur mitigasi struktural di lereng Merapi. Beberapa bentuk kegiatan mitigasi struktural diantaranya penyusunan peta kawasan rawan bencana, pembangunan dam sabo, pembangunan sistem peringatan dini, dan lainnya.

Sementara di masyarakat sendiri secara turun menurun dari leluhur mereka sebenarnya telah mengenal bentuk mitigasi non struktural atau lebih tepatnya sebagai mitigasi kultural. Mitigasi kultural merupakan sisi internal masyarakat yang berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat lokal dalam bentuk kearifan berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Bentuk kegiatan mitigasi kultural merupakan cerminan dari faktor internal yang diekspresikan melalui norma kehidupan dan ritual budaya.

Menjelang dan sesudah erupsi Merapi 2010 kedua bentuk mitigasi tersebut telah mengkonstruksi persepsi masyarakat lereng selatan Merapi terhadap kebencanaan. Permasalahannya sejauh mana masyarakat memaknai kedua bentuk mitigasi tersebut terutama menjelang dan sesudah erupsi Merapi 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemaknaan masyarakat terhadap mitigasi kultural dan struktural menjelang dan sesudah erupsi Merapi 2010. Hasil penelitian diharapkan memberi gambaran bagaimana makna mitigasi bagi kehidupan masyarakat setelah mereka mengalami erupsi besar Merapi 2010.

METODE PENELITIAN

Studi didasari logika induksi dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan sumber dari

ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang dijadikan sebagai subyek penelitian (Moleong, 2004). Sumber utama data sebagai instrumen adalah penduduk korban erupsi Gunungapi Merapi yang tinggal pada kawasan rawan bencana II atau III berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana tahun 2002 (Hadisantono et al., 2002) di Desa Umbulharjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang rumahnya masih bisa ditinggali dengan terlebih dulu dilakukan perbaikan ringan sampai sedang. Secara spesifik informan adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Pelemsari, Pangukrejo, dan Kopeng yang pemukimannya merupakan wilayah terdepan berbatasan langsung dengan padang piroklastik hasil erupsi 2010. Dalam penelitian dipilih kepala keluarga yang dijadikan sumber informasi utama dan anggota keluarganya yang sudah dewasa sebagai informan pendukung. Penelitian dilaksanakan setengah tahun pasca erupsi gunungapi Merapi saat berakhirnya fase tanggap darurat yaitu sekitar Bulan Mei Juni 2011.

Analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan mendasarkan tafsiran terkait dengan pemaknaan suatu analog yang dipahami dari lisan dan data tekstual. Pemaknaan menggunakan pendekatan hermeneutika dengan didasari konsep penghidupan berkelanjutan (Sumaryono, 1993). Pengalaman hidup yang dialami dan dipersepsikan oleh informan serta konstruksi pemikiran yang mereka pahami secara turun menurun serta pengetahuan dari berbagai sumber informasi, merupakan sumber yang akan ditafsirkan maknanya. Analisis didukung dengan dokumen dan literatur bersifat historis yang juga dapat memberikan gambaran pemaknaan masyarakat terhadap Merapi di masa lampau dan perkembangannya di masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bentuk mitigasi struktural sebelum erupsi Merapi 2010 yang dikenal oleh masyarakat adalah keberadaan dam penahan sedimen atau sabo serta menara sirine dan pengeras suara. Sementara keberadaan Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi tahun 2002 kurang diketahui oleh masyarakat. Pada saat erupsi Merapi terjadi, anjuran-anjuran dari pemerintah lewat televisi, radio, koran, dan aparat desa juga merupakan bagian dari mitigasi struktural.

Semua informan memaknai secara positif keberadaan menara sirine dan pengeras suara. Keberadaan menara sirine dan pengeras suara ini sangat berperan ketika aktivitas Merapi meningkat. Pengambilan keputusan untuk mengungsi

sangat ditentukan oleh bunyi sirine dari menara tersebut. Dalam mitigasi struktural keberadaan menara sirine dan pengeras suara merupakan bagian penting dalam sistem peringatan dini.

Untuk keberadaan dam penahan sedimen, pernah memicu kontroversi erupsi Merapi 2006. Aliran piroklastik atau aliran awan panas di Kali Gendol meluap dan mengubur obyek wisata Kaliadem pada erupsi 2006. Luapan diduga karena aliran piroklastik menabrak dam sabo yang dibangun di sebelah timur Kaliadem pada jarak sekitar 4 kilometer dari puncak Merapi. Sebagian informan sependapat dengan hal tersebut, akan tetapi informan lainnya kurang sependapat dengan hal tersebut. Tetapi pada erupsi 2010 hal tersebut ada benarnya ketika kantong-kantong sabo penuh dengan piroklastik, aliran lahar melampaui alur sungai dan menggenangi lahan pertanian bahkan permukiman di sepanjang sungai. Hal ini menjadikan semua informan sependapat bahwa dam penahan sedimen lebih menguntungkan bagi masyarakat di bagian hilir tetapi membahayakan mereka yang tinggal dibagian hulu.

Di sepanjang Sungai Gendol lereng selatan Merapi ada sebanyak 19 buah dam penahan sedimen (Rahmad *et al.*, 2008). Saat erupsi 2010, aliran piroklastik menerobos 13 dam penahan sedimen dan berhenti di dam penahan sedimen ke 14 sekitar 17 km dari puncak Merapi yaitu dam GE-C (Plumbon II). Setengah tahun pasca erupsi Merapi 2010 terjadi luapan lahar dingin di dam penahan sedimen ke 18 yaitu dam GE-C (Rogobangsan) sekitar 20 km dari puncak Merapi yang menggenangi permukiman dan lahan pertanian. Hal tersebut menjadikan para informan penasaran terhadap keberadaan dan penahan sedimen atau sabo tersebut.

Untuk Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi setelah erupsi 2010 para informan belum pernah melihatnya. Sebagian informan menyatakan bahwa mereka pernah mendengar posisi tempat tinggal mereka di KRB II atau III berdasarkan peta, tetapi mereka tidak paham maksudnya secara mendalam. Bahkan sebagian informan memberi makna negatif pada peta KRB, karena berdasarkan peta KRB posisi permukiman mereka harus ditinggalkan dan bersedia direlokasi. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang peta KRB sebagai akibat dari kurang tersosialisasinya peta KRB, menjadikan pemaknaan yang tidak tepat terhadap peta KRB.

Sementara bentuk mitigasi kultural sebelum erupsi Merapi 2010 yang dikenal oleh masyarakat adalah kegiatan upacara adat. Melalui upacara adat masyarakat selalu diingatkan tentang eksistensi mereka dan hubungan mereka dengan lingkungan. Selain itu upacara adat juga

sebagai bentuk komunikasi antara segenap masyarakat dengan alam adikodrati yang merupakan sumber kesuburan dan kemakmuran. Saling ingat mengingatkan antar masyarakat terkait banyak hal termasuk perkembangan perilaku Merapi terjalin dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Hal-hal inilah yang sering dikenal sebagai bentuk mitigasi bencana secara kultural. Nilai-nilai yang mendasar dari berbagai aktivitas budaya adalah nilai kerukunan, kebersamaan, dan hormat terhadap lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir batin (Triyoga, 2010).

Upacara adat yang masih dilaksanakan secara rutin di dusun oleh para informan adalah upacara adat *Suran* yang dilaksanakan pada tanggal 1 *Suro* (salah satu dari 12 nama bulan dalam kalender Jawa pada urutan bulan pertama). Selain itu upacara adat *Nyadran* yang dilaksanakan pada Bulan Ruwah (salah satu dari 12 nama bulan dalam kalender Jawa pada urutan bulan kedelapan). Sementara upacara labuhan yang diselenggarakan tiap tahun oleh Kraton Yogyakarta yang dipimpin oleh juru kunci Merapi Mbah Marijan tidak selalu diikuti oleh semua informan. Demikian juga ritual upacara tertentu terkait dengan Merapi hampir tidak dikenali oleh para informan. Sangat mungkin kedua bentuk upacara adat terakhir ini kurang memiliki urgensi terhadap kehidupan para informan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Informan berusia tua menyatakan bahwa ada kebiasaan setiap bulan *Sura* yang merupakan awal tahun baru Jawa, Merapi selalu mengeluarkan suara gemuruh, banjir lahar atau letusan. Kebiasaan Jawa pada bulan tersebut orang akan melakukan ritual pembersihan dan pencucian diri, membersihkan lingkungan, serta berziarah ke tempat-tempat kramat. Begitu pula dengan Gunung Merapi yang dipersepsikan adanya Kraton Merapi di puncaknya, pada bulan *Sura* ini Kraton Merapi juga melakukan bersih-bersih. Wujud dari kegiatan itu adalah keluarnya gas, abu, pasir, dan batuan vulkanik yang dianggap sebagai kotoran Kraton Merapi. Selain setiap Bulan *Sura*, secara rutin delapan tahun sekali pada tahun *Wawu* (salah satu dari 8 nama tahun dalam kalender Jawa), Merapi akan erupsi yang relatif besar. Pandangan inilah yang mendorong masyarakat melakukan ritual *Suran* berupa kenduri setiap tahunnya.

Selain upacara adat *Suran*, para informan juga masih menjalankan upacara *Nyadran*. Informan berusia tua masih mempercayai bahwa mereka yang menjadi korban letusan merapi adalah orang-orang yang telah berbuat kesalahan terhadap *Eyang Merapi* (sebutan bagi penguasa Kraton Merapi), melupakan leluhur dan adat, mau-

pun banyak berbuat dosa. Leluhur disini meliputi para penguasa Merapi maupun cikal bakal desa. Dikenal juga nama-nama mahluk halus penghuni Merapi yang dapat dibagi dalam leluhur, dhayang, dan lelembut. Untuk tidak berbuat kesalahan, dosa, dan lupa leluhur, maka ritual *Nyadran* diselenggarakan setiap tahunnya.

Kedua upacara adat yaitu *Suran* dan *Nyadran* yang masih dijalankan di dusun para informan, terkandung makna yang mendalam tentang hakekat mitigasi kultural. Upacara adat *Suran* tidak lepas dari aktivitas alam adikodrati Kraton Merapi setiap tahun baru Jawa atau setiap sewindu (8 tahunan) yang oleh para ilmuwan vulkanologi disebutkan sebagai siklus erupsi Merapi. Upacara tersebut tidak lepas dari kepercayaan adanya kehidupan di luar alam manusia yang saling berinteraksi. Interaksi antara manusia di alam nyata dengan kehidupan gaib di Kraton Merapi harus dijaga keharmonisannya supaya manusia di alam nyata dapat selamat dan sejahtera. Triyoga (2010) menyebutkan bahwa fungsi upacara adat adalah untuk menetralisasi bencana yang datangnya dari luar kekuasaan manusia, terutama yang datang dari alam gaib Kraton Merapi. Melalui mahluk halus pengganggu dapat dinetralisir bahkan dapat berbalik menjadi penolong. Dalam upacara adat terjadi perdamaian antara manusia dengan mahluk halus yang diwujudkan dalam makan bersama. Dalam upacara adat selain diucapkan doa dan mantra, disediakan juga dengan sesaji makanan, bunga, dan kemenyan. Dengan sedekah tersebut diharapkan mahluk halus membalas jasa dengan tidak mengganggu kehidupan dan memberikan keselamatan kepada penduduk.

Kaplan and Manners (1999) dan dalam pandangan Koentjaraningrat (2002) tentang sistem nilai budaya dalam sebuah kebudayaan yang dikembangkan Kluckhohn, yaitu mengenai masalah hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya, masyarakat lereng selatan Merapi ini termasuk berpersepsi menjaga keselarasan manusia dengan alam. Pada kebudayaan lainnya dikenal juga adanya pandangan bahwa alam sebagai sesuatu yang sangat dahsyat, sehingga manusia pada hakekatnya hanya bisa bersifat menyerah saja tanpa banyak yang dapat diusahakannya. Sebaliknya banyak pula kebudayaan khususnya budaya modern yang memandang alam sebagai sesuatu yang harus dapat dilawan oleh manusia dan menjadi kewajiban manusia untuk menaklukkan alam. Persepsi inilah yang mendorong masyarakat melakukan ritual berupa kenduri setiap tahunnya. Pandangan keselarasan manusia dengan alam ini telah menjadi suatu kekuatan kepercayaan bagi masyarakat dalam menghadapi

bencana. Kepercayaan tersebut merupakan modal manusia lereng selatan Merapi dalam beradaptasi dengan Merapi, bukan menghindari maupun melawan.

Pada dasarnya orang Jawa diajar bukan untuk menguasai alam, tetapi bagaimana menyesuaikan diri dengan kehidupan alam yang serba misteri. Perilaku selalu memahami alam atau *titen* merupakan tindakan yang bijak warisan para leluhur. Para leluhur dengan perilaku *titen* terhadap alam telah membangun berbagai konsep kehidupan. Misalnya dalam hal tanad-tanda Gunungapi Merapi akan meletus, maka tanda-tanda akan terlihat melalui berbagai media berupa alam nyata maupun alam gaib. Mimpi-mimpi yang dialami beberapa warga kadang harus ditafsirkan secara bersama-sama. Demikian juga dengan tempat-tempat kramat di berbagai lokasi lereng Merapi yang dihindari untuk beraktivitas, tindakan-tindakan yang harus dijaga ketika lewat tempat tertentu, merupakan hasil dari pengalaman hidup para leluhur dalam memahami alam nyata maupun gaib. Disinilah penghargaan yang tinggi masyarakat terhadap para leluhurnya. Mengenal leluhur merupakan upaya mewarisi kebijakan-kebijakan yang pernah diajarkan dan yang penting adalah melanjutkan perilaku *titen* terhadap gunungapi sebagai perwujudan mitigasi kultural. Dengan kebijakan tersebut harmonisasi manusia dengan alam akan tetap dapat diwujudkan sampai ke generasi berikutnya (Mitchell *et al*, 2000). Hal inilah yang menjadikan kunjungan ke makam leluhur menjadi sangat bermakna bagi masyarakat saat upacara adat *Nyadran* pada bulan Ruwah.

Keyakinan terhadap mitigasi kultural yang dibangun lewat ritual adat pada dasarnya adalah memaknai perilaku bijak para leluhur yang *titen* terhadap dinamika Merapi, lingkungan alam Merapi, dan kehidupan masyarakatnya dari waktu ke waktu. Dalam catatan Triyoga (2010) dan pemahaman beberapa informan, cikal bakal desa mereka dimulai oleh Kyai Wonodriyo dan pengikutnya yang diperkirakan mulai mendiami sekitar wilayah ini kurang lebih tahun 1850-an sebagai pelarian untuk menghindari politik tanam paksa yang diterapkan Pemerintah Belanda. Setelah bermukim di sekitar wilayah ini, Kyai Wonodriyo diangkat sebagai juru kunci Merapi dan kepala desa oleh Raja Kraton Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono VII. Pengalaman hidup Kyai Wonodriyo sampai ke generasi terakhirnya yaitu Mbah Marijan, merupakan sumber informasi yang telah merekonstruksi mitigasi kultural di masyarakat. Faktor tersebut menjadikan masyarakat menaruh kepercayaan kepada para leluhur dan turunannya.

Namun demikian dinamika erupsi Gunungapi Merapi merupakan peristiwa geologi yang telah berlangsung > 400.000 tahun yang lalu (Ratdomopurbo dan Andreastuti, 2000; Yusuf, 2005). Masyarakat Umbulharjo dan Kepuharjo yang baru bermukim sekitar 160 tahun kelihatannya belum sepenuhnya berpengalaman dengan erupsi besar Merapi. Catatan erupsi besar Merapi dengan *Volcanic Eruption Index* (VEI) sekitar 3 dan 4 adalah tahun 1846-1849, 1872, 1930, dan 1961 dengan wilayah berdampak terhadap kehidupan manusia berarah lereng timur Merapi Kabupaten Magelang (Voight *et al.*, 2000). Hal tersebut menjadikan *titen* warisan leluhur masyarakat Umbulharjo dan Kepuharjo sangat terbatas pada dinamika erupsi yang kecil.

Keadaan tersebut sebenarnya menunjukkan letak kelemahan mitigasi kultural terhadap bencana geologi erupsi gunungapi. *Titen* yang didasari oleh pengalaman hidup sangat dibatasi waktu. Sementara peristiwa geologi yang dapat menimbulkan bencana merupakan peristiwa dengan skala waktu yang jauh lebih panjang. Pengalaman erupsi Merapi yang berkesan di masyarakat Umbulharjo dan Kepuharjo adalah tahun 2006 yang arahnya ke desa tersebut. Capaian aliran awan panas sekitar 4 km dari puncak Merapi dan hanya menghancurkan kawasan wisata Kaliadem di Desa Kepuharjo. Sementara erupsi Merapi 2010 aliran awan panasnya mencapai sekitar 17 km dari puncak Merapi.

Sebaliknya mitigasi struktural tidak sekedar didasarkan pada sejarah pengalaman erupsi secara lokal, tetapi juga kajian sejarah geologi yang lebih panjang dari berbagai sektor lereng maupun perbandingan dengan tipe-tepe gunungapi lainnya. Mitigasi struktural juga lebih terorganisasi secara multi pihak sehingga memungkinkan adanya akurasi dalam pelaksanaan mitigasi. Namun demikian pengalaman masa lampu mitigasi struktural lebih bersifat *top down* yang kurang menyentuh pemahaman masyarakat seperti pembangunan dam sabo dan keberadaan peta KRB. Hal tersebut berakibat sering terjadinya perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah (Laksono, 2009).

Berdasarkan uraian pemaknaan para informan di atas dan beberapa referensi pendukung, maka dapat diartikan adanya dua kelompok masyarakat dalam memaknai mitigasi kultural dan struktural sebelum dan pasca erupsi 2010. Kelompok masyarakat pertama, sebelum erupsi mitigasi kultural lebih bermakna bagi masyarakat sementara pasca erupsi masyarakat memaknai secara terpadu mitigasi kultural dan struktural. Kelompok ini diwakili oleh informan di Umbulharjo yang berdekatan dengan tempat tinggal Mbah

Marijan dan tempat tinggal mereka mengalami kerusakan pada erupsi tanggal 26 Oktober. Kelompok masyarakat kedua, sebelum erupsi dan pasca erupsi masyarakat telah memaknai secara terpadu mitigasi kultural dan struktural. Kelompok ini terdiri dari informan di Kepuharjo yang lebih jauh tempat tinggalnya dengan Mbah Marijan dan tempat tinggal mereka mengalami kerusakan pada erupsi tanggal 5 November.

Erupsi tanggal 26 Oktober yang mengakibatkan meninggalnya Mbah Marijan merupakan peristiwa yang potensial memudahkan mitigasi kultural berdasarkan kepercayaan juru kunci Merapi, sebaliknya memperkuat kepercayaan mitigasi struktural berdasarkan himbauan pemerintah. Disinilah masyarakat kelompok pertama yang kurang memberi makna pada mitigasi struktural banyak memperoleh pelajaran yang berharga. Erupsi besar 2010 ternyata melampaui perkiraan yang mereka pahami selama ini. Sebaliknya pemerintah telah menyiapkan segala antisipasi terjadinya bencana yang lebih besar meskipun masih banyak keterbatasannya. Sementara kelompok masyarakat lainnya, telah meninggalkan rumah mereka secara sukarela ketika pemerintah menetapkan untuk tindakan pengungsian yang informasinya mereka terima dari berbagai sumber.

Pasca erupsi 2010 masyarakat mulai merekonstruksi kembali makna mitigasi kultural dan struktural bagi kehidupan mereka. Kondisi kehidupan secara fisik, sosial, ekonomi, budaya, maupun psikologis masyarakat yang belum pulih secara normal, bisa jadi menjadikan para informan memaknai mitigasi kultural dan struktural secara terpadu. Mereka masih terombang-ambing kepada pemerintah dalam memutuskan rencana-rencana yang menyangkut kelanjutan tempat tinggal mereka. Akan tetapi untuk eksistensi kehidupan sehari-hari mereka memiliki ketangguhan secara mandiri meskipun sangat terbuka memperoleh bantuan-bantuan dari berbagai sumber yang diantaranya difasilitasi oleh pemerintah.

Dalam kondisi setengah tahun pasca erupsi, dialog antara mitigasi kultural dan struktural akan sangat bermakna bagi masyarakat. Para informan masih memaknai tentang adanya takdir kehidupan yang bersumber dari keyakinan agama, pandangan hidup Jawa, dan kepercayaan-kepercayaan terhadap Gunungapi Merapi dalam kehidupannya berinteraksi dengan alam. Hal ini dapat bermakna bahwa mereka masih akan melanjutkan tradisi budaya yang selama ini telah berlangsung. Pemaknaan tersebut merupakan modal sosial dan modal manusia ketika menghadapi guncangan akibat bencana. Para informan juga mengakui peran pemerintah dalam melindungi, memberikan informasi, arahan, dan bantuan pada

saat status Merapi meningkat dan saat mereka dalam kepanikan bencana erupsi Merapi. Peranan pemerintah ketika masa tanggap darurat berlangsung juga memberikan makna positif bagi para informan. Para informan juga menyadari bahwa apa yang disampaikan pemerintah tidak selalu bermuatan kepentingan tertentu. Hal ini dapat bermakna bahwa pemerintah dalam mengkonstruksi mereka untuk memaknai bahwa kehidupan dengan alam Merapi terdapat suatu risiko kebencanaan berdasarkan rasionalitas ilmiah dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Indiyanto (2012), indikator teknis maupun mistis pada erupsi gunungapi mengacu pada suatu gejala yang sama, hanya saja cara membaca, menafsirkan, dan mengkomunikasikannya yang berbeda bahasa.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan mitigasi kultural dan struktural oleh masyarakat dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan waktu sebelum dan sesudah erupsi 2010. Kelompok masyarakat pertama, sebelum erupsi mitigasi kultural lebih bermakna, sementara pasca erupsi masyarakat memaknai secara terpadu mitigasi kultural dan struktural. Kelompok masyarakat kedua, sebelum erupsi dan pasca erupsi masyarakat telah memaknai secara terpadu mitigasi kultural dan struktural. Pada mitigasi kultural, interaksi masyarakat dengan alam berorientasi pada takdir kehidupan yang bersumber dari pandangan hidup Jawa dan kepercayaan-kepercayaan terhadap Gunungapi Merapi. Sementara untuk mitigasi struktural, pemerintah mengkonstruksi masyarakat untuk memaknai bahwa kehidupannya dengan alam Gunungapi Merapi terdapat suatu risiko kebencanaan berdasarkan rasionalitas ilmiah. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya kajian yang lebih mendalam bagaimana cara memadukan antara bentuk mitigasi struktural dan kultural dalam menata kembali ruang lereng selatan Merapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PS-K3) Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan dukungan pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisantono, Andreastuti, Abdurachman, Sayudi, Nursusanto, Sumpeno, Muzani, 2002. *Peta Kawasan Rawan Gunungapi Merapi Jawa Tengah dan DIY*. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bandung.
- Indiyanto, A., 2012. Risiko Bencana. Mempertemukan Sains dan Pengetahuan Lokal. Dalam *Respons Masyarakat Lokal Atas Bencana*. Mizan Pustaka dan CRCS UGM, Bandung.
- Kaplan, D., Manners, A., 1999. *Teori Kebudayaan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2002. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Laksono, P., M., 2009. *Persepsi Setempat dan Nasional Mengenai Bencana Alam : Sebuah Desa di Gunung Merapi dalam Spektrum Budaya (Kita)*. Pusat Studi Asia Pasifik-Ford Foundation-Kepel Press, Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mitchell, B., Setiawan, B., Rahmi, D.H., 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Poerwanto, H., 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Prespektif Antropologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahmad, A., Legono, D., Kusumosubroto, H., 2008. Pengelolaan Sedimen Kali Gendol Pasca Erupsi Merapi Juni 2006. Dalam *Jurnal Forum Teknik Sipil* No. XVIII/2-Mei, Fak. Teknik UGM, Yogyakarta.
- Ratdomopurbo, Andreastuti, S., D., 2000. *Karakteristik Gunungapi Merapi*. Direktorat Vulkanologi, Bandung
- Sumaryono, E., 1993. *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Suseno, F., M., 2001. *Etika Jawa*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Triyoga, L. S., 2010. *Merapi dan Orang Jawa. Persepsi dan Kepercayaannya*. Kompas Gramedia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Voight, B., Constantine, E.K., Siswoidjono, S., Torley, R., 2000. Historical Eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia, 1768-1988. *Journal of Volcanology and Geothermal Research* 100 (2000). www.elsevier.nl/locate/jvolgeores.p 69-138.
- Yusuf, Y., 2005. Studi Sensitivitas Terhadap Bahaya Awan Panas Gunungapi Merapi di Kawasan Rawan Bencana II dan III. *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.